

**ANALISIS KEBIJAKAN
KESEHATAN
(MIKM - UNDIP)**

**“POLICY & PUBLIC POLICY”
(KONSEP DASAR & PENGERTIAN)**

Dra. AYUN SRIATMI, M.Kes

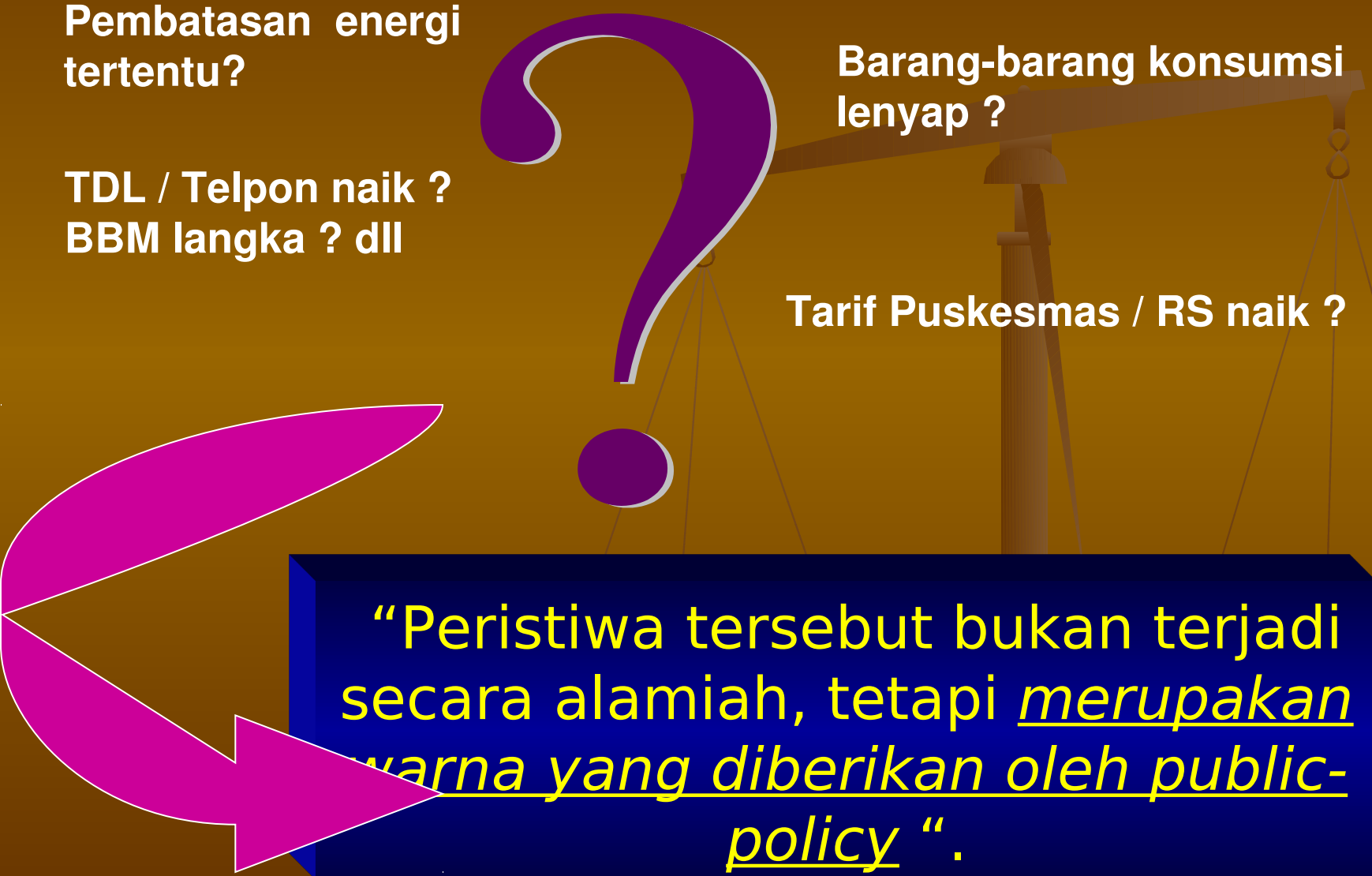
Ongkos
transportasi naik ?

Pembatasan energi
tertentu?

TDL / Telpon naik ?
BBM langka ? dll

Barang-barang konsumsi
lenyap ?

Tarif Puskesmas / RS naik ?



“Peristiwa tersebut bukan terjadi secara alamiah, tetapi merupakan suatu keputusan yang diberikan oleh public- policy “.

PENGERTIAN POLICY



H. HECLLO ('72) : Policy bukan istilah yang jelas dengan sendirinya
“ Tindakan yang sengaja dilakukan atau ketidakmauan untuk bertindak secara sengaja “.

D. EASTON ('53) : “Policy terdiri dari serangkaian keputusan dan tindakan yang mengandung nilai”.

W.I. JENKIN ('78) :
“Policy merupakan serangkaian keputusan yang saling terkait.....berkenaan dengan pemilihan tujuan dan cara utk mencapainya dlm situasi tertentu ”

POLICY ?

“ **SUATU PROGRAM PENCAPAIAN TUJUAN, NILAI-NILAI & PRAKTEK-PRAKTEK YANG TERARAH** “
(*Harold D Lasswell & Abraham Kaplan*)

“ **SERANGKAIAN TINDAKAN YANG MEMPUNYAI TUJUAN TERTENTU YANG DIKUTI & DILAKSANAKAN OLEH SEORANG AKTOR / SEJUMLAH AKTOR GUNA MEMECAHKAN SUATU MASALAH TERTENTU** “

“ **SUATU PEDOMAN UNTUK BERTINDAK** “
(*United Nations*)

**IDENTIFIKASI TUJUAN
YANG INGIN DICAPAI**

“POLICY”
(*Amara Raksasataya*)

Elemen

**TAKTIK / STRATEGI
DARI BERBAGAI
LANGKAH**

**PENYEDIAAN BERBAGAI
INPUT**



Public Policy (Kebijakan Negara)

- PARKER ('75)** : Suatu tujuan / serangkaian asas / tindakan tertentu yang dilaksanakan pemerintah pada suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan suatu subyek atau respon terhadap suatu keadaan yang krisis.
- T.R. Dye ('78)** : Semua pilihan / tindakan yang dilakukan oleh pemerintah (*baik untuk melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu*).
- NAKAMURA & S. WOOD ('80)** : Serentetan instruksi / perintah dari pembuat kebijakan yang ditujukan kepada para pelaksana kebijakan yang menjelaskan ttujuan & cara untuk mencapai tujuan.

Thomas R. Dye :

“ Apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan ”.

James E. Anderson :

“ Adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikembangkan oleh badan-badan & pejabat-pejabat pemerintah ”.

George C. Edwards III & Ira Sharkansky :

“Adalah apa yang dinyatakan & dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, dan berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah “.

DALAM KONSEP DEMOKRASI MODERN

Kebijakan publik tidak hanya berisi cetusan pikiran / pendapat pejabat / wakil rakyat, tetapi opini publik (public-opinion) juga harus tercermin dalam public-policy.

Setiap public-policy harus selalu berorientasi pada kepentingan publik (public-interest)

Public-policy

“ Serangkaian tindakan yang ditetapkan & dilaksanakan / tidak dilaksanakan o/ pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat “.

BENTUKNYA
BERUPA
PENERAPAN
TINDAKAN-
TINDAKAN
PEMERINTAH

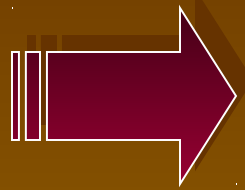
TIDAK CUKUP
HANYA
DINYATAKAN,
TETAPI
HRS DILAKSANAKAN
DLM BENTUK
NYATA

DILANDASI DGN
MAKSUD DAN
TUJUAN
TERTENTU

HRS SENANTIASA
DITUJUKAN BAGI
KEPENTINGAN
SELURUH
ANGGOTA
MASYARAKAT

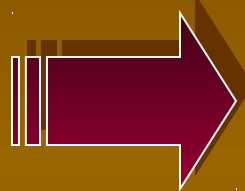
Kategori Alasan

PERLU
DIPELAJARI



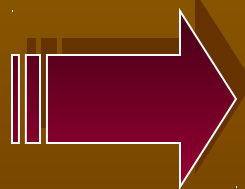
1. ALASAN ILMIAH (SCIENTIFIC REASON)

Pengetahuan tentang hakikat, proses & akibat yang ditimbulkan (sebagai variabel bebas *or* terikat)



2. ALASAN PROFESIONAL (PROFESSIONAL REASON)

Upaya menerapkan pengetahuan ilmiah untuk pecahkan masalah sosial yang terjadi dimasyarakat. Memberi masukan bermanfaat.



3. ALASAN POLITIS (POLITICAL REASON)

Agar pemerintah dapat membuat kebijaksanaan yang tepat untuk capai tujuan yang tepat pula.

STUDI “KEBIJAKAN PUBLIK”

1. MEMBAHAS BGMN ISSUE2 & PROBLEM2 DISUSUN (*constructed*) & DIDEFINISIKAN, DAN BGMN SEMUANYA TSB DILETAKKAN DLM AGENDA KEBIJAKAN & AGENDA POLITIK. (**Dewey**)
2. STUDI TTG “BAGAIMANA, MENGAPA & APA EFEK” DR TINDAKAN AKTIF (*action*) & PASIF (*inaction*) PEMERINTAH. (**Heidenheimer**)
3. STUDI TTG “APA YG DILAKUKAN PEMERINTAH, MENGAPA MENGAMBIL TINDAKAN TSB & APA AKIBAT DR TINDAKAN TSB”. (**Thomas Dye**)
4. STUDI “SIFAT, SEBAB & AKIBAT DR KEBIJAKAN PEMERINTAH”. (**Nagel**)

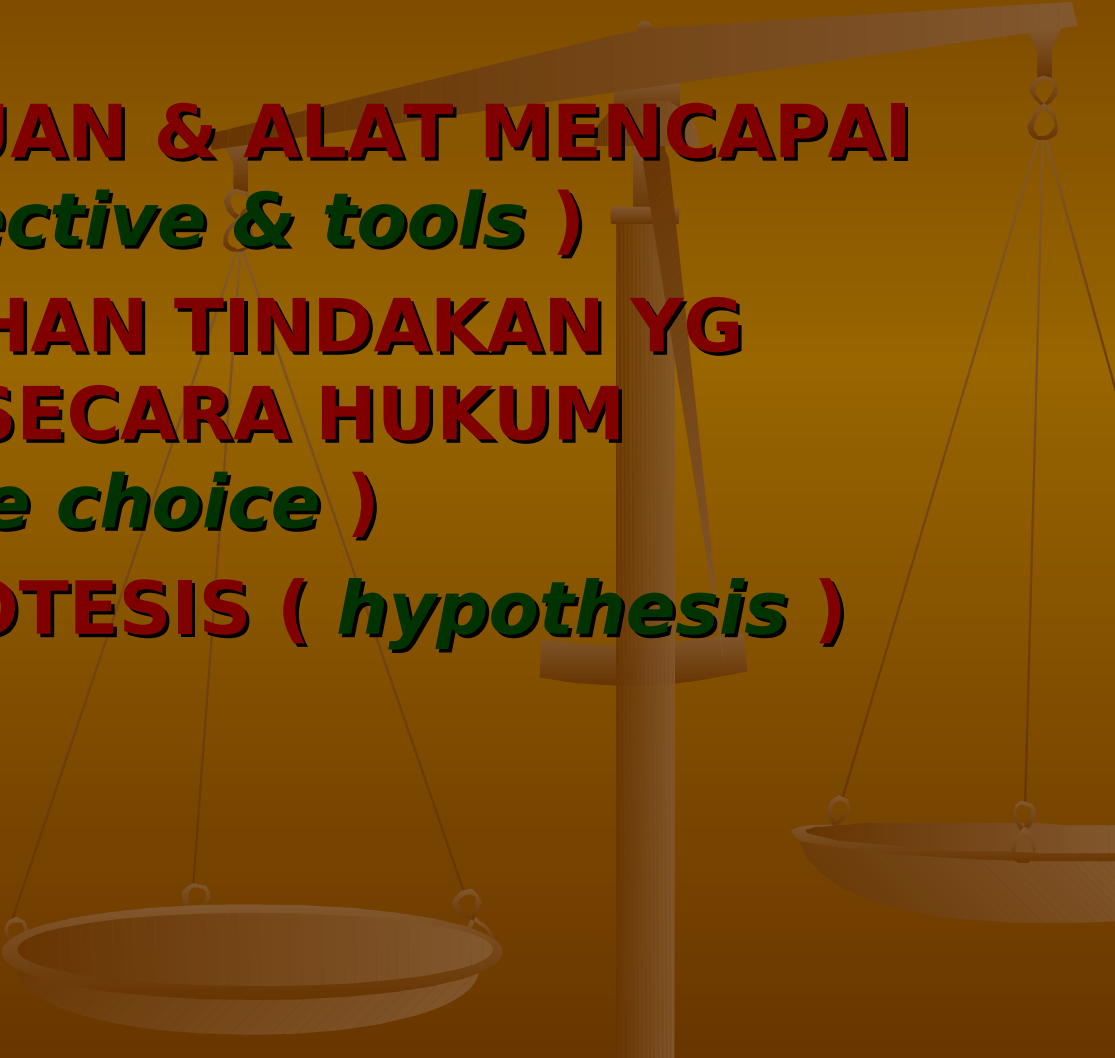
STUDI PUBLIC POLICY

MENCAKUP UPAYA :

1. MENGGAMBARAKAN ISI KEBIJAKAN PUBLIK / NEGARA
2. PENILAIAN MENGENAI DAMPAK DARI KEKUATAN LINGKUNGAN TERHADAP ISI KEBIJAKAN PUBLIK
3. ANALISIS AKIBAT DARI BERBAGAI PENGATURAN KELEMBAGAAN & PROSES POLITIK TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK
4. PENELITIAN MENGENAI AKIBAT DARI BERBAGAI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP SISTEM POLITIK
5. EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN PUBLIK PADA MASYARAKAT (*INTENDED OR UNINTENDED*)

(*By : Thomas Dye*)

DIMENSI KEBIJAKAN PUBLIK

1. **SEBAGAI TUJUAN & ALAT MENCAPAI TUJUAN (*objective & tools*)**
 2. **SEBAGAI PILIHAN TINDAKAN YG LEGAL / SAH SECARA HUKUM (*authoritative choice*)**
 3. **SEBAGAI HIPOTESIS (*hypothesis*)**
- 

Sistem Politik

Lembaga, Proses & Perilaku Politik

LINGKUNGAN

KEBIJAKAN
PUBLIK

Kekuatan & Kondisi Lingkungan

Kebijakan Publik

MELIPUTI :

Kesejahteraan
Urbanisasi
Sistem Ekonomi
Tingkat Pendidikan
Ketimpangan-ketimpangan
Struktur Kelas
Pola Kebudayaan
Komposisi Rasial
Keragaman Agama
dll

MELIPUTI :

Bentuk Pemerintahan
Tipe Konstitusi
Birokrasi
Sistem Kepartaian
Struktur Kekuasaan
Pola Partisipasi
Sistem Kelompok
Kepentingan
Derajat Konflik
Watak rezim
dll

MELIPUTI :

Kebijakan hak-hak sipil
Kebijakan redistribusi pendapatan
Kebijakan Pendidikan
Kebijakan Kesejahteraan
Kebijakan Kesehatan
Kebijakan Pertahanan
Kebijakan Perpajakan
Kebijakan Energi
Kebijakan Lingkungan
dll

**POLICY – DEMANDS
(TUNTUTAN KEBIJAKAN)**

ADALAH TUNTUTAN / DESAKAN YANG DITUJUKAN PADA PEJABAT PEMERINTAH YANG DILAKUKAN OLEH AKTOR-AKTOR / PIHAK LAIN (SWASTA / PEMERINTAH), UNTUK MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN TINDAKAN TERTENTU.

MISAL : TUNTUTAN UNTUK MENINJAU KEMBALI PENYERLENGGARAAN SDSB, DLL

POLICY – DECISIONS (KEPUTUSAN KEBIJAKAN)

IALAH : SEGALA KEPUTUSAN YANG DIBUAT OLEH PARA PEJABAT PEMERINTAH YANG DIMAKSUDKAN UNTUK MEMBERIKAN KEABSAHAN, KEWENANGAN ATAU MEMBERIKAN ARAH TERHADAP PELAKSANAAN KEBIJAKAN NEGARA.

MISAL : MENETAPKAN KEPUTUSAN, MENCIPTAKAN STATUTA (KETENTUAN DASAR), MENGELUARKAN PERINTAH EKSEKUTIF, MENCANANGKAN PERATURAN ADMINISTRATIF & MEMBUAT PENAFSIRAN TERHADAP UNDANG-UNDANG, DLL.

**POLICY – STATEMENT
(PERNYATAAN KEBIJAKAN)**

**IALAH : PERNYATAAN RESMI ATAU ARTIKULASI
(PENJELASAN) MENGENAI KEBIJAKAN NEGARA
TERTENTU.**

MISAL : DEKRIT PRESIDEN, PIDATO-PIDATO RESMI, DLL

POLICY – OUTPUTS (KELUARAN KEBIJAKAN)

MERUPAKAN WUJUD KEBIJAKAN NEGARA YANG PALING DAPAT DILIHAT DAN DIRASAKAN KARENA MENYANGKUT HAL-HAL YANG MENYATAKAN DILAKUKAN PEMERINTAH (*REALISASI*).

(DIBEDAKAN ANTAR APA YANG DIKERJAKAN DENGAN APA YANG INGIN DIKERJAKAN)

MISAL : JUMLAH TENAGA DOKTER & PARAMEDIS YANG DITEMPATKAN DI DAERAH TERPENCIL, JUMLAH DANA BANTUAN SOSIAL YANG DISALURKAN, DLL

POLICY – OUTCOMES (HASIL AKHIR / DAMPAK KEBIJAKAN)

MERUPAKAN AKIBAT ATAU DAMPAK YANG BENAR-BENAR DIRASAKAN OLEH MASYARAKAT, BAIK YANG DIHARAPKAN ATAU TIDAK, SEBAGAI KONSEKUENSI DARI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM BIDANG / MASALAH TERTENTU

MISAL : KEBIJAKAN TENTANG “ *FULL EMPLOYMENT POLICY* ”

- ✎ ADA KESEMPATAN KERJA PENUH, KHUSUSNYA BAGI NAKER DENGAN PENDIDIKAN RENDAH.**
- ✎ MENINGKATKAN RASA PERCAYA DIRI PEKERJA.**
- ✎ KECEMBURUAN SOSIAL ANTARA PENGANGGUR TERDIDIK DENGAN PENGANGGUR TIDAK TERDIDIK.**

**“WELFARE COMES FROM JUDGEMENT”,
“JUDGEMENT COMES FROM EXPERIENCE”,
“EXPERIENCE COMES FROM MISTAKES”,
“MISTAKES COME FROM BAD JUDGEMENT”**

(PEPATAH CHINA)